

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aharon Barak. 2006. *The Judge in a Democracy*. Princeton University Prsss: New Jersey.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.F Strong. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media: Bandung.
- Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairul Umam. 2016. *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar: Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Kanisius: Yogyakarta. hlm. 56.
- Maruar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Ni'matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

## **C. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi terhadap Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara Presiden Republik Indonesia terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Jurnal, Koran, dan Dokumen Lain**

Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. "Independensi Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Volume 8. Nomor 5.

Danang Hardianto. 2014. "Hakim Konstitusi adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Volume 11. Nomor 2.

Feri Amsari. "Kuda Troya' Bagi MK". Kompas. 4 April 2013.

M. Nurul Fajri. 2013. "Hubungan Rekrutmen Hakim Konstitusi dengan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Winda Wijayanti dan Nuzul Quraini M. 2014. “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi”. Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 4.

#### E. Website

<http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>.

<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/18211101/ketua-mk-arief-hidayat-kembali-dilaporkan-ke-dewan-etik/>.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PutusanEtik&pages=1&menu=2>

[https://abanet.org/ceeli/publications/jri/jri\\_factors.html](https://abanet.org/ceeli/publications/jri/jri_factors.html)

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>

<https://www.tufts.edu/departemens/fletcher/multi/texts>

<https://www.un.org/overview/rights.htm/01/27/05310071/patrialis.akbar.hakim.mk.pilihan.sby.yang.sempat.jadi.polemik>

